

Berkah Atau Bencana? Desentralisasi Sumber Daya Alam Dan Nasib Kesejahteraan Masyarakat: Sebuah Kajian Literatur

Evi Savitri^{1✉}, Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng²

^{1,2}Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstrak

Desentralisasi sumber daya alam (SDA) di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui otonomi daerah dalam pengelolaan SDA. Namun, kebijakan ini menghadapi tantangan seperti ketidaksetaraan distribusi manfaat, eksploitasi berlebihan, dan potensi korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak desentralisasi SDA terhadap kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Data dikumpulkan dari jurnal bereputasi menggunakan teknik bibliometrik dengan perangkat lunak VOSviewer dan Publons/Perish untuk memetakan tren penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika didukung oleh tata kelola yang baik, partisipasi masyarakat, dan regulasi ketat. Sebaliknya, dalam kondisi tata kelola yang lemah, desentralisasi justru memperparah ketimpangan sosial dan merusak lingkungan. Studi perbandingan dengan negara lain, seperti Brasil dan India, menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi bergantung pada mekanisme pengawasan dan keterlibatan komunitas lokal. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya transparansi, distribusi manfaat yang adil, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola SDA secara berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan mencakup peningkatan akuntabilitas, mekanisme dana abadi SDA, dan pengawasan lebih ketat terhadap eksploitasi sumber daya.

Kata Kunci: Desentralisasi, Sumber Daya Alam, Kesejahteraan Masyarakat, Otonomi Daerah, Tata Kelola.

Abstract

Decentralization of natural resources in Indonesia aims to improve people's welfare through regional autonomy in natural resource management. However, this policy faces challenges such as unequal distribution of benefits, overexploitation, and potential corruption. This study aims to analyze the impact of natural resource decentralization on community welfare using a Systematic Literature Review (SLR) approach. Data were collected from reputable journals using bibliometric techniques with VOSviewer and Publons/Perish software to map research trends. The results show that decentralization can improve people's welfare if it is supported by good governance, community participation, and strict regulations. Conversely, under conditions of weak governance, decentralization exacerbates social inequality and damages the environment. Comparative studies with other countries, such as Brazil and India, show that the success of decentralization depends on oversight mechanisms and the involvement of local communities. The conclusions of this study emphasize the importance of transparency, equitable distribution of benefits, and strengthening the capacity of local governments to manage natural resources sustainably. Policy recommendations include increased accountability, a natural resource endowment mechanism, and stricter oversight of resource exploitation.

Keywords: Decentralization, Natural Resources, Community Welfare, Regional Autonomy, Governance.

✉ Corresponding author : dip.13.783@ipdn.ac.id

Email Address : dip.13.783@ipdn.ac.id, zubakhrum@gmail.com

Received tanggal bulan tahun, Accepted tanggal bulan tahun, Published tanggal bulan tahun

PENDAHULUAN

Desentralisasi di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan langkah penting dalam transformasi sistem ketatanegaraan yang sebelumnya bersifat sentralistik. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pelayanan publik, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, desentralisasi diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya (Ramadhan & Khoirunurrofik, 2024; Guntoro, 2021; Suriadi et al., 2024).

Namun, meskipun desentralisasi menawarkan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tantangan dan risiko juga muncul. Penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya, konflik kepentingan, dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang tidak terkelola dengan baik (Eha, 2024; Nanga & Hudang, 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi apakah desentralisasi SDA di Indonesia membawa berkah atau malah bencana bagi kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan ini menjadi relevan dalam konteks global, di mana banyak negara juga menerapkan desentralisasi dengan hasil yang beragam (Amami & Asmara, 2022).

Studi literatur menunjukkan bahwa hasil dari desentralisasi SDA bervariasi, tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan politik masing-masing daerah. Misalnya, di beberapa daerah di Indonesia, desentralisasi telah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan (Riyanto & Kovalenko, 2023; Zaky, 2023). Namun, di daerah lain, desentralisasi justru memperburuk ketimpangan dan menciptakan konflik antara pemerintah daerah dan masyarakat (Santi & Iskandar, 2021; Guntoro, 2021). Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika ini secara menyeluruh agar kebijakan yang diambil dapat efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi hasil desentralisasi SDA, termasuk kualitas tata kelola, partisipasi masyarakat, dan konteks sosial-ekonomi setempat (Rahman & Hilmi, 2021; Suriadi et al., 2024). Dengan pendekatan analisis literatur, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai implikasi desentralisasi SDA dan menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagai studi kasus, penelitian ini akan membandingkan pengalaman desentralisasi di Indonesia dengan negara lain yang juga menerapkan kebijakan serupa. Misalnya, di negara-negara seperti India dan Brasil, desentralisasi telah memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya, yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat (Amami & Asmara, 2022). Namun, tantangan seperti korupsi dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya juga muncul di negara-negara tersebut, yang menunjukkan bahwa desentralisasi bukanlah solusi universal (Eha, 2024).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan berfokus pada konteks Indonesia, tetapi juga akan mengkaji pengalaman negara lain dalam desentralisasi SDA. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana desentralisasi dapat diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai konteks.

METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis pengaruh desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian sebelumnya secara sistematis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik yang dikaji (Cahyono et al., 2019). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggali teori dan konsep yang telah berkembang, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap) serta peluang inovasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam berbasis desentralisasi (Faguet, 2012).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari literatur ilmiah yang relevan melalui berbagai basis data terkemuka seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan Garuda. Artikel yang dikumpulkan berasal dari jurnal-jurnal bereputasi yang membahas isu-isu terkait desentralisasi, otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pencarian literatur menggunakan kata kunci spesifik seperti "Desentralisasi Sumber Daya Alam", "Otonomi Daerah dan Kesejahteraan", "Dana Bagi Hasil SDA", dan "Pengelolaan SDA Berkelanjutan" dengan menerapkan strategi pencarian berbasis operator logika (AND, OR, NOT) untuk memperoleh referensi yang lebih terfokus (Fauzi, 2019). Selain pencarian otomatis, penelitian ini juga melakukan penelusuran manual pada daftar pustaka dari artikel-artikel yang relevan untuk menemukan sumber tambahan yang mendukung analisis.

Setelah literatur terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data menggunakan teknik bibliometrik dengan bantuan perangkat lunak VOSviewer dan Publons/Perish. Analisis bibliometrik ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren penelitian yang berkembang, jaringan keterkaitan antarpenelitian, serta tema-tema utama dalam diskursus desentralisasi pengelolaan sumber daya alam (Ribot & Peluso, 2003). VOSviewer digunakan untuk memetakan hubungan antara penelitian-penelitian sebelumnya dan mengidentifikasi topik yang paling banyak dikaji dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Publons/Perish dimanfaatkan untuk mengevaluasi dampak sitasi dari penelitian terdahulu serta

memahami bagaimana desentralisasi telah mempengaruhi berbagai aspek sosial-ekonomi di berbagai negara (Larson, 2002).

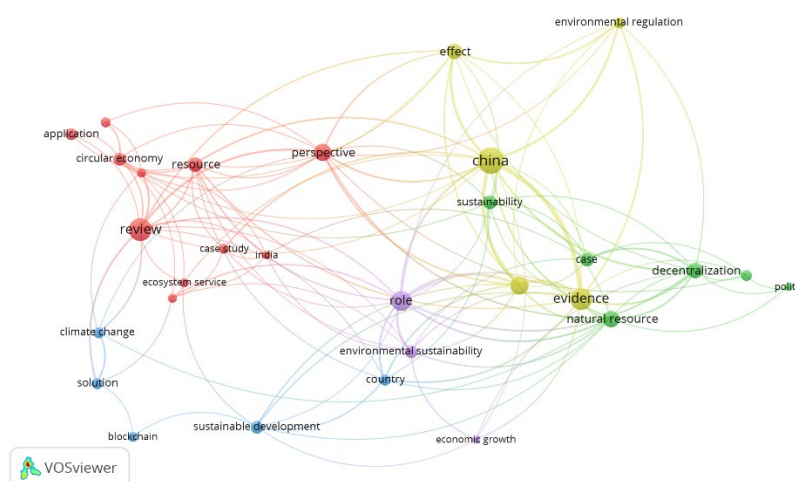
Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga mengkaji studi kasus dari berbagai negara yang telah menerapkan kebijakan desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Sebagai contoh, di Brasil, kebijakan desentralisasi dalam pengelolaan hutan telah memberikan hak lebih besar kepada komunitas lokal, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pengelolaan yang lebih berkelanjutan (Ostrom, 2009). Sementara itu, di India (Kerala), masyarakat lokal terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya air yang berdampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi mereka (Rondinelli, 1981). Tidak hanya melihat pengalaman dari negara lain, penelitian ini juga membahas kasus-kasus dari daerah di Indonesia yang telah menerapkan desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dengan hasil yang beragam. Sebagai contoh, di Kabupaten Malang, kebijakan desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya air berbasis masyarakat telah meningkatkan partisipasi warga dan memperbaiki kesejahteraan lokal (Suhartono, 2013). Sementara itu, di daerah pesisir Pangempang, pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber daya pesisir telah terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial (Shaw, 2002).

Dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) yang dikombinasikan dengan analisis bibliometrik, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam kajian desentralisasi sumber daya alam serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam diskursus desentralisasi, otonomi daerah, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tren Penelitian Desentralisasi dan Kesejahteraan Masyarakat

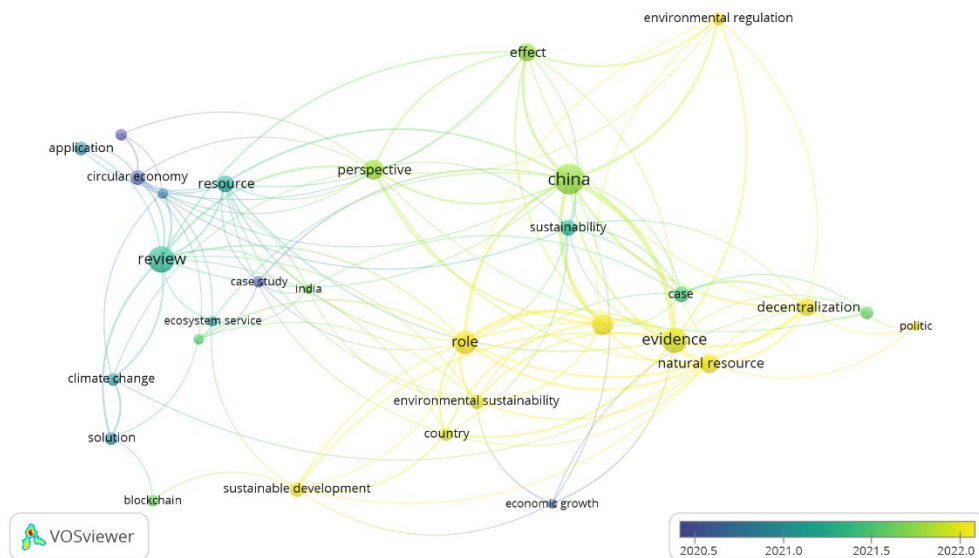


Gambar 1. Visualisasi Berdasarkan Kata Kunci

Sumber: VosViewers, 2025

Berdasarkan hasil analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer, terdapat beberapa temuan utama yang perlu diperhatikan. Gambar 1 menunjukkan visualisasi

berdasarkan kata kunci yang sering muncul dalam penelitian terkait desentralisasi sumber daya alam. Kata kunci seperti "otonomi daerah," "kesejahteraan masyarakat," dan "desentralisasi fiskal" memiliki hubungan erat dalam jaringan penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa topik tersebut menjadi fokus utama dalam kajian akademik dalam beberapa tahun terakhir (Guntoro, 2021; Suriadi et al., 2024).



Gambar 2. Overlay Berdasarkan Tren Tahun Publikasi

Sumber: VosViewers, 2025

Sementara itu, Gambar 2 menggambarkan overlay tren tahun publikasi, menunjukkan bahwa penelitian terkait kesejahteraan masyarakat dan desentralisasi mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2021. Hal ini sejalan dengan kebijakan desentralisasi yang semakin diperkuat di berbagai negara, termasuk Indonesia (Santi & Iskandar, 2021). Kenaikan jumlah publikasi sejak 2021 juga mengindikasikan bahwa perhatian akademisi terhadap dampak desentralisasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan (Ramadhan & Khoirunurrofik, 2024).

Pembahasan

Desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya mereka sendiri (Fauzi, 2019). Namun, pengalaman empiris menunjukkan hasil yang beragam, tergantung pada faktor-faktor seperti tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, dan regulasi yang diterapkan (Suriadi et al., 2024). Bagian ini akan menganalisis dampak desentralisasi terhadap kesejahteraan masyarakat, membandingkan pengalaman dari berbagai daerah di Indonesia serta negara lain, serta mengkaji teori-teori yang mendukung dan bertentangan dengan konsep ini.

Dampak Ekonomi Desentralisasi SDA

Desentralisasi memungkinkan daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor SDA, seperti Dana Bagi Hasil (DBH). Studi kasus Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa DBH sektor migas pada tahun 2019 mencapai Rp2,6 triliun, yang berkontribusi besar terhadap APBD daerah (Ramadhan & Khoirunurrofik, 2024). Hal ini juga diamati di daerah lain, seperti Riau dan Kalimantan Timur, yang mengalami peningkatan anggaran daerah dari sektor SDA (Guntoro, 2021). Selain meningkatkan pendapatan daerah, investasi dalam infrastruktur dan pengembangan kapasitas masyarakat meningkat di beberapa daerah setelah desentralisasi. Kabupaten Kutai Kartanegara, misalnya, berhasil menggunakan pendapatan migas untuk membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit, yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal (Amami & Asmara, 2022). Dengan adanya anggaran yang lebih besar, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana untuk program kesejahteraan sosial. Kabupaten Bojonegoro, misalnya, mengalokasikan sebagian DBH untuk program pendidikan gratis dan peningkatan layanan kesehatan (Rahman & Hilmi, 2021).

Tantangan dalam Implementasi Desentralisasi SDA

Namun, meskipun terjadi peningkatan pendapatan daerah, distribusi manfaatnya tidak selalu merata. Studi di Kalimantan menunjukkan bahwa sebagian besar keuntungan industri ekstraktif jatuh ke tangan elit lokal dan perusahaan asing, sementara masyarakat adat sering kali tidak mendapatkan manfaat yang layak (Nanga & Hudang, 2023). Ketidakseimbangan dalam distribusi keuntungan dan dampak lingkungan dari eksploitasi SDA sering kali memicu konflik. Di Kabupaten Sumbawa Barat, masyarakat lokal terlibat dalam sengketa dengan perusahaan tambang karena kurangnya transparansi dalam pembagian keuntungan (Eha, 2024). Selain itu, desentralisasi sering kali meningkatkan risiko korupsi, terutama dalam pemberian izin eksploitasi SDA. Di beberapa daerah di Sumatra dan Kalimantan, penyelewengan dana bagi hasil dan suap dalam izin pertambangan sering kali terjadi (Santi & Iskandar, 2021).

Faktor Penentu Keberhasilan Desentralisasi SDA

a. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Studi menunjukkan bahwa daerah dengan tata kelola yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas tinggi, cenderung mendapatkan manfaat lebih besar dari desentralisasi (Bardhan & Mookherjee, 2006). Kabupaten Banyuwangi, misalnya, menerapkan sistem keterbukaan anggaran yang memastikan bahwa pendapatan dari SDA digunakan secara optimal (Rondinelli, 1981).

b. Partisipasi Masyarakat

Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penentu keberhasilan desentralisasi. Di Kerala, India, model desentralisasi berbasis partisipasi masyarakat telah berhasil meningkatkan kesejahteraan sosial melalui mekanisme musyawarah lokal dalam pengelolaan SDA (Riyanto & Kovalenko, 2023).

c. Pengawasan dan Regulasi

Pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat dan lembaga antikorupsi dapat mengurangi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan SDA. Brasil, misalnya, memiliki sistem pemantauan hutan yang mengurangi deforestasi akibat eksploitasi ilegal (Zaky, 2023).

Analisis Teori yang Relevan

a. Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Menurut Faguet (2012), desentralisasi yang efektif bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola SDA dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

b. Teori Pilihan Publik

Shaw (2002) mengungkapkan bahwa dalam banyak kasus, aktor politik di tingkat lokal cenderung memaksimalkan kepentingan pribadi dibanding kesejahteraan masyarakat, yang dapat menyebabkan ketimpangan dalam distribusi manfaat SDA.

c. Teori Sumber Daya Bersama

Ostrom (2009) menunjukkan bahwa pengelolaan SDA yang berbasis komunitas lebih berkelanjutan dibandingkan dengan model berbasis pemerintah atau swasta. Studi di Kanada menunjukkan bahwa masyarakat adat yang diberi hak kelola atas SDA berhasil mempertahankan kelestarian hutan dan perikanan mereka (Ribot & Peluso, 2003).

d. Teori Keadilan Distribusi

Teori ini menekankan pentingnya distribusi manfaat SDA yang adil untuk menghindari konflik sosial. Jika manfaat hanya dinikmati oleh segelintir elit, ketidakstabilan sosial dapat terjadi (Suhartono, 2013).

Studi Perbandingan: Pengalaman Internasional dalam Desentralisasi SDA

Brasil: Desentralisasi dalam pengelolaan hutan di Brasil menunjukkan hasil positif dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan menekan angka deforestasi (Amami & Asmara, 2022).

India: Di Kerala, program desentralisasi berbasis komunitas telah meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan dalam akses SDA (Eha, 2024).

Afrika Selatan: Sebaliknya, di Afrika Selatan, desentralisasi SDA sering kali gagal karena lemahnya regulasi dan tingginya tingkat korupsi dalam sektor tambang (Suriadi et al., 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi SDA dapat membawa manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat jika diterapkan dengan

prinsip tata kelola yang baik, partisipasi masyarakat, dan pengawasan ketat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, desentralisasi dapat memperburuk ketimpangan dan merusak lingkungan. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diajukan antara lain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SDA, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, menerapkan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah eksploitasi SDA yang berlebihan, membentuk dana abadi SDA seperti di Norwegia untuk menjamin manfaat jangka panjang, serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam tata kelola SDA melalui pelatihan dan bantuan teknis (Santina, 2024). Dengan langkah-langkah ini, desentralisasi dapat benar-benar menjadi berkah bagi kesejahteraan masyarakat, bukan bencana yang memperburuk ketimpangan sosial dan lingkungan.

Referensi :

- Amami, R. and Asmara, K. (2022). Analisis pengaruh pad, dau, dak, dan belanja modal terhadap kemiskinan di kabupaten ngawi. *Jurnal Ekobistek*. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297>
- Eha, J. (2024). Analisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat menggunakan indikator badan kependudukan dan keluarga berencana nasional. *jgs*, 2(1), 27-35. <https://doi.org/10.69606/geography.v2i1.82>
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan otonomi daerah. *Jurnal Cendekia Jaya*, 3(2), 1-9. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>
- Nanga, M. and Hudang, A. (2023). Dampak desentralisasi fiskal terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi daerah di indonesia. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2206-2217. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13201>
- Rahman, M. and Hilmi, M. (2021). Hubungan pemberdayaan masyarakat perajin “bernyet” dengan kesejahteraan keluarga di desa poncogati kabupaten bondowoso. *Learning Community Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(1), 66. <https://doi.org/10.19184/jlc.v5i1.25303>
- Ramadhan, F. and Khoirunurrofik, K. (2024). Akuntabilitas dan kondisi keuangan daerah otonomi khusus pada provinsi aceh, papua, dan papua barat. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 14(1), 33-45. <https://doi.org/10.22212/jekp.v14i1.2382>
- Riyanto, M. and Kovalenko, V. (2023). Partisipasi masyarakat menuju negara kesejahteraan: memahami pentingnya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374-388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Santi, S. and Iskandar, D. (2021). Kebijakan desentralisasi dan ketimpangan capaian pembangunan wilayah di indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(3), 490-506. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i3.198>
- Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Yandri, L. (2024). Desentralisasi dan upaya peningkatan otonomi daerah: menuju pembangunan berkelanjutan di indonesia. *Menara Ilmu*, 18(1). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>
- Zaky, M. (2023). Pandangan ekonomi islam pada desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah di jawa barat. *Prestise*, 3(2). <https://doi.org/10.15575/prestise.v3i2.33426>
- Bardhan, P., & Mookherjee, D. (2006). *Decentralization and local governance in developing countries: A comparative perspective*. MIT press.
- Cahyono, E. A., Sutomo, N., & Hartono, A. (2019). Literatur review; panduan penulisan dan penyusunan. *Jurnal Keperawatan*, 12(2), 12.
- Faguet, J.-P. (2012). *Decentralization and popular democracy: Governance from below in Bolivia*. University of Michigan Press.

- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119-136.
- Larson, A. M. (2002). Natural resources and decentralization in Nicaragua: Are local governments up to the job? *World Development*, 30(1), 17-31.
- Ostrom, E. (2009). A polycentric approach for coping with climate change. Available at SSRN 1934353.
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153-181.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective: theory and practice in developing countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133-145.
- Santina, R. (2024). Pengaruh Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 9496-9502.
- Shaw, J. S. (2002). Public choice theory. *The Concise Encyclopedia of Economics*, 1-7.
- Suhartono, S. (2013). Desentralisasi pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(18), 240019.